

## MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU PENGADILAN AGAMA AMPANA

JL. Merdeka Kompleks Perkantoran Bumi Mas Kel. Uemalingku Kec. Ratolindo Telp. (0464) 2253400 Website : pa-ampana.go.id E-Mail : pa.ampana@yahoo.com KAB. TOJO UNA-UNA SULAWESI TENGAH

## SOP PENYERAHAN AKTA CERAI

Nomor	SOP/AP/34
Tanggal Pembuatan	1 Juli 2019
Tanggal Revisi	2 Januari 2025
Revisi Ke	-
Tanggal Efektif	2 Januari 2025
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Ampana
PENGADI	MUH, SYARIF, S.H.I. NIP. 19780529 200604 1 001

DOKUMEN MASTER	:	<b>✓</b>	
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

## Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA AMPANA Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA AMPANA

DAS	AR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA			
1.	Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan	Menguasai tatacara pemanggilan			
	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan	Menguasai wilayah hukum PA tempat tujuan Menguasai Aplikasi SIPP dan Tabayyun online			
	Agama pasal 84 ayat (4)	Memahami teknis acara/ hukum acara			
2.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor :	Memahami mekanisme pemanggilan delegasi melalui media			
	KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan	online			
	Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan				
3.	Agama dan Pengadilan Tinggi Agama; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor				
٥.	026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan				
	Peradilan;				
4.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor				
	KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II				
	Pedoman pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan;				
5.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.2/2013				
	tentang tata cara penyetoran penerimaan negara bukan				
	pajak oleh bendahara penerimaan				
6.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5 Tahun 2014				
7	tentang penerimaan negara secara elektronik				
7.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 35 Tahun 2012				
	Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional				
	Prosedur Administrasi Pemerintahan;				
8.	Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. No. 002				
	Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar				
	Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung				
9.	dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya. Surat Edaran dirjen Badilag Nomor				
).	0377.a/DjA/HM.00/2/2016 tentang Pedoman Pola				
	Pelaporan Perkara Pengadilan Agama				

KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN			
1.	SOP Penerimaan Perkara	Komputer, Relaas, Buku kontrol panggilan, Jaringan internet Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, kendaraan, aplikas tabayyun / media online			
2.	SOP Persidangan				
3	SOP Transparansi dan Informasi perkara	tabayyan / media omme			
4	SOP Pemanggilan pihak secara langsung				
5	SOP Pemanggilan pihak melalui Kepala Desa				
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN			
	Petugas meja 3 mendapa tinformasi perkara putus dari : a. Majelis Hakim dalam bentuk instrument perincian biaya perkara yang diterima dari para pihak jika sidang pembacaan putusan dihadiri oleh kedua pihak b. Relaas pemberitahuan dari Juru Sita Pengganti jika verstek	<ol> <li>Akta Cerai</li> <li>Penetapan Sidang Ikrar Talak</li> <li>Aplikasi Bantu Register AC dan SIPP</li> </ol>			
	Pada perkara Cerai Talak, Akta Cerai diterbitkan pada hari sidang Ikrar talak diucapkan setelah meja 3 menerima penetapan ikrar talak				
3.	Pada perkara Čerai Gugat, Akta Cerai diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.				
4.	Pengadilan menyiapkan salinan Putusan/Penetapan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diucapkan				
5.	Pengadilan menyerahkan Akta Cerai dan salinan Putusan/Penetapan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2014)				

		Pelaksana			Mutu Baku			
No	Aktivitas	Meja III	Kasir	Meja II	Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima permohonan pengambilan Akta Cerai				Buku Agenda	2 Menit	Permohonan diterima	
2	Menyerahkan instrumen PNBP				Instrumen PNBP	2 menit	Instrumen PNBP sudah diserahkan	
3	Menerima pembayaran PNBP sesuai ketentuan		•		Kwitansi	2 Menit	Pembayaran PNBP sudah diterima	
4	Mencatat ke dalam Register Akta Cerai dan Register Gugatan			<b>—</b>	Register	2 Menit	Tercatat dalam register	
	Waktu : 8 Menit							